

**Implementasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi untuk  
Kendaraan Dinas di Kota Semarang**

Oleh:

Afina Putri Saffanah, Kismartini, Dewi Rostyaningsih

**Jurusan Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Email : [afinaps@gmail.com](mailto:afinaps@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Fuel Oil Control Policy refer to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1 2013 regarding control of the use of a particular fuel oil. The fuel oil subsidy control program aims to stabilize the fuel oil consumption, fuel oil subsidies are mainly so that in the future can still be consumed. As we know that all our needs there is no escape from a fuel oil, whether it be of processing or use. So with the fuel oil control is expected to continue to meet the needs now and in the future.*

*The process of implementation of the policy of fuel oil control in achieving the goal of factor supporting and inhibitors factors. Based on the theory of George Edward III, factors that support and hinder form of Resources, Bureaucratic Structure, Communication, and Disposition.*

*The factors supporting the implementation of the fuel oil control include: human resources of the actors implementing sufficient resources to FUEL the build-up would be adequate, there is a consistency of information from the Government, the SOP has been understood by the executor, the coordination is going well, behavior implementer policy is according to the role of each in*

*existing regulations. And inhibiting factors are not sufficient budget resources needs of the users of official vehicles, the lack of readiness of the user service vehicles in implementing existing regulations, the sanctions have not been applied strictly.*

***Keyword : Policy, Fuel Oil, Implementation.***

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategis bagi masyarakat di Desa maupun Kota baik kebutuhan rumah tangga, sektor industri maupun transportasi. Oleh karena itu, jumlah transportasi yang beredar sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap BBM. Semakin padat transportasi berarti semakin meningkat pula konsumsi terhadap BBM, sedangkan bahan bakar minyak itu sendiri terbatas persediaannya. Jumlah BBM yang terbatas memaksa kita untuk dapat menghematnya. Mengupayakan diri untuk hemat dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak setidaknya dapat menstabilkan kondisi minyak bumi kita yang produksinya kini terus merosot, pencapaiannya tidak

sampai satu juta barel per hari, oleh karena itu kita perlu mengendalikan penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Pemerintah berupaya mengendalikan penggunaan Bahan Bakar Minyak melalui pembatasan BBM bersubsidi / jenis BBM tertentu. Upaya yang dilakukan pemerintah itu dimulai dengan seluruh mobil dinas telah diwajibkan tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi.

Pemerintah bertekad menekan penggunaan subsidi BBM, selain mengantisipasi kelangkaan BBM juga subsidi ini menyedot anggaran yang cukup besar. Sehingga pemerintah menargetkan dalam empat-lima tahun ke depan, tidak ada lagi subsidi BBM. Anggaran itu akan digunakan untuk program yang lebih bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi dan membuka lapangan kerja, seperti proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya sangat besar. Usaha pengendalian penggunaan BBM bertujuan untuk menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional serta sebagai upaya terus menerus dalam menjaga besaran volume Bahan Bakar Minyak.

Kebijakan pengendalian penggunaan jenis BBM tertentu itu tercantum dalam Permen ESDM RI Nomor 01 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang merupakan penegasan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Penggunaan Jenis BBM tertentu, serta merupakan kelanjutan dari Permen ESDM No.12/2012 yang sebelumnya telah melarang kendaraan dinas menggunakan premium, serta solar bagi kendaraan perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Kemudian ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu

untuk Kendaraan Dinas terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM.

## B. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk Kendaraan Dinas di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

## C. TEORI

Wibawa, dkk., (1994: 15) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. (dalam Haedar Akib, 2010)

Implementasi kebijakan pengendalian BBM subsidi dilihat melalui prinsip-prinsip dasar implementasi kebijakan yang efektif menurut Riant Nugroho, antara lain:

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksanaan
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan
5. Ketepatan Proses

Efektivitas implementasi kebijakan pengendalian BBM subsidi dipengaruhi oleh beberapa faktor dari model implementasi George Edward III, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Struktur Birokrasi
4. Disposisi

#### D. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010). Subjek penelitian ini adalah mereka yang dianggap paling tahu tentang permasalahan terkait penelitian ini yang selanjutnya disebut informan. Sumber Informasi didapat dari sampel sebagai informan yang ditentukan dengan teknik sampling tertentu. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan nonprobability dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 53-54). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang-orang yang dianggap paling tahu tentang sesuatu yang diharapkan oleh peneliti agar memudahkan peneliti untuk melakukan penjelajahan obyek/situasi sosial yang diteliti.

#### PEMBAHASAN

Proses pengendalian BBM subsidi di Kota Semarang diukur dari 5 (lima) dimensi ketepatan.

1. Ketepatan Kebijakan  
Kebijakan pengendalian penggunaan BBM subsidi dinilai mampu memecahkan masalah ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan BBM bersubsidi yang mengakibatkan anggaran APBN/APBD melampaui standar setiap tahunnya dengan keterbatasan sumber daya minyak di bumi.

Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM no.1 tahun 2013.

  - Belum ada kesiapan dari pengguna kendaraan dinas dalam pelaksanaan pengendalian BBM karena belum terlihat ukuran/bentuk kesiapannya.
  - Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi berakibat menciptakan perubahan baru yang lebih baik dibidang lain.
2. Ketepatan Pelaksanaan
  - Belum semua Implementor kebijakan sudah mengetahui dengan benar lembaga yang menangani pengendalian BBM di Kota Semarang.
  - Aktor pelaksana yang menangani kebijakan pengendalian BBM sudah tepat dan sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan Tupoksi masing-masing.
3. Ketepatan Target
  - Target dan sasaran yang mengikuti pengendalian BBM subsidi untuk kendaraan dinas di Kota
4. Ketepatan Lingkungan
  - Tidak ada interaksi khusus antara lembaga perumus kebijakan dengan aktor pelaksana (pengguna kendaraan dinas) pengendalian BBM bersubsidi di Kota Semarang, pelaksana di Kota Semarang hanya mematuhi peraturan yang ada.
  - Belum semua respon publik bersifat positif karena masih ditemukan penyelewengan dari pihak pengguna kendaraan dinas sehingga

menimbulkan respon negatif dari publik.

#### 5. Ketepatan Proses

- *Policy Acceptence*, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dipahami sebagai bentuk upaya penghematan energi.
- *Policy Adoption*, pengguna kendaraan dinas menerima kebijakan pengendalian BBM subsidi sebagai kebutuhan di masa depan. Pelaksana mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama proses pengendalian BBM subsidi.
- *Policy Readiness*, belum ada kesesuaian antara kesiapan pelaksana kebijakan dengan ketidaksiapan sasaran kebijakan. Jadi masih terjadi penyelewengan dari oknum-oknum tertentu.

Keefektivan ketepatan implementasi pengendalian BBM bersubsidi dipengaruhi beberapa faktor:

Faktor-faktor:

1. Sumber Daya
2. Komunikasi
3. Struktur Birokrasi
4. Disposisi

Keefektivan implementasi:

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksanaan
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan
5. Ketepatan Proses

Faktor Pendukung:

1. Sumber daya manusia dari sisi aktor pelaksana memadai.
2. Sumber daya BBM persediaannya mencukupi.
3. Ada konsistensi informasi dari pemerintah.
4. SOP sudah dipahami oleh para pelaksana.
5. Koordinasi berjalan dengan baik dalam tataran pelaksana di Kota Semarang.
6. Perilaku pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan peran masing-masing dalam peraturan yang ada.

#### Faktor Penghambat:

1. Sumber daya anggaran belum mencukupi kebutuhan para pengguna kendaraan dinas.
2. Kurangnya kesiapan dari pengguna kendaraan dinas dalam melaksanakan peraturan yang ada.
3. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Sanksi belum diterapkan secara tegas.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Keefektifan implementasi kebijakan pengendalian BBM didorong oleh adanya faktor-faktor pendorong di dalamnya. Kemudian timbulnya permasalahan atau kendala dalam implementasi pengendalian BBM subsidi di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat. Adanya kesiapan dari para aktor ternyata tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan kebijakan pengendalian BBM. Pada kenyataannya, dalam implementasi pengendalian BBM subsidi di Kota Semarang masih ditemukan bentuk penyimpangan dari oknum tertentu. Walaupun sumber daya staff dan sumber daya ketersediaan BBM subsidi juga telah mencukupi, tapi sumber daya anggaran yang tidak mencukupi kebutuhan pengguna kendaraan dinas untuk anggaran penggunaan BBM non subsidi menjadi kendala utama disamping adanya disparitas harga yang terlampaui tinggi antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi. Kemudian apabila kejujuran dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi, serta tanggung jawabnya dengan peraturan yang ditetapkan tersebut tidak disertai dengan pemberian sanksi tegas untuk pelanggarnya, maka tidak ada efek jera bagi oknum-oknum yang melakukan kecurangan tersebut. Dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa disposisi berupa wewenang pemberian sanksi tidak efektif. Secara keseluruhan implementasi kebijakan pengendalian BBM subsidi

untuk kendaraan dinas di Kota Semarang belum efektif.

## B. SARAN

1. Sumber daya anggaran perlu ditingkatkan, perlu diberikan tambahan untuk kekurangan anggaran yang dikeluhkan pengguna kendaraan dinas sudah tidak ada lagi dan dapat tercukupi kebutuhannya untuk pembelian BBM non subsidi sehingga tidak ada lagi alasan karena anggaran yang diberikan masih kurang.
2. Struktur birokrasi dalam hal koordinasi perlu ditingkatkan, memperbaiki koordinasi antara Departemen Keuangan dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kekurangan anggaran pelaksanaan pengendalian BBM.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna kendaraan dinas dengan cara sosialisasi kembali akan pentingnya pengendalian BBM subsidi sebagai bentuk penghematan bahan bakar minyak agar para pengguna kendaraan dinas lebih memahami tujuan pengendalian

BBM sehingga mereka mempunyai kesiapan yang matang dalam pelaksanaan kedepannya.

4. Dalam disposisi terdapat wewenang pelaksana, wewenang tersebut termasuk di dalamnya adalah sanksi yang diterapkan. Perlu diterapkannya sanksi yang tegas. Selama ini pemerintah belum tegas memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar dan melakukan penyelewengan dengan tidak mematuhi peraturan pengendalian BBM subsidi tersebut. Seharusnya ada sanksi tegas yang diterapkan sehingga penyimpangan tidak terulang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu



Politik Universitas Gadjah  
Mada, Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian  
Pendidikan Pendekatan  
Kuantitatif, Kualitatif, dan  
R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Memahami  
Penelitian Kualitatif. Bandung:  
Alfabeta.

Suwitri, Sri. 2011. Konsep Dasar  
Kebijakan Publik. Semarang:  
Badan Penerbit Universitas  
Diponegoro.

Wahab, Solichin A. 2005. Analisis  
Kebijakan dari Formulasi ke  
Implementasi Kebijakan, Bumi  
Aksara Jakarta.

Widodo, Solichin. 2011. Analisis  
Kebijakan dan Formulasi ke  
Implementasi Kebijakan.  
Jakarta: Bumi Aksara.

Moeleong, Lexy J. 2007. Metode  
Penelitian Kualitatif. Bandung  
: Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2011. Public Policy.  
Jakarta: Gramedia.

#### **Sumber Jurnal:**

Akib, Haedar. 2010. Implementasi  
Kebijakan: Apa, Mengapa, dan  
Bagaimana. Jurnal Ilmu  
Administrasi Publik. Volume 1  
No.1. Universitas Negeri  
Makassar

Denhart, Janet V dan Robert B.  
Denhart. 2003. The New  
Public Service: Serving, Not  
Steering. M. E. Sharpe, New  
York.

Denhart, Robert B. 2008. Theories of  
Public Organization. Thomson  
& Wadsworth. USA. Fifth  
Edition.

Mazmanian, Daniel A and Paul A.  
Sabatier. 1983. Implementation  
and Public Policy, Scott  
Foresman and Company, USA.

#### **Sumber Internet:**

Administrator. 2012. DPR Undang  
Stakeholder Bahas Pembatasan  
BBM Bersubsidi.  
<http://esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5371-dpr-undang-stakeholder-bahas-pembatasan-bbm-bersubsidi>. Diunduh 29  
November 2012.

Badan Pemerintah Daerah Kota Semarang. 2014. Dalam <http://semarangkota.go.id/porta/index.php/article/details/visi-dan-misi> dan <http://semarangkota.go.id/porta/index.php/article/details/kondisi-umum> . Diunduh 22 Maret 2014.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2014. Dalam <http://semarangkota.bps.go.id/index.php/en/keadaan-geografi> . Diunduh 23 Maret 2014.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. 2014. Dalam <http://www.esdm.jatengprov.go.id/> . Diunduh 23 maret 2014.

Istibsaroh, Nur. (2013, 18 Agustus). SPBU Mulai Dipasang Pengendali BBM Bersubsidi. <http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=82956> . Diunduh 12 januari 2014.

PT. Pertamina (Persero). 2013. Dalam <http://www.pertamina.com/> . Diunduh 19 Maret 2013.

Suara Merdeka. (2012, 23 April). Pembatasan BBM Bersubsidi Menuai Kritik. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/23/116303/Pembatasan-BBM-Bersubsidi-Menuai-Kritik>. Diunduh 26 Mei 2013

#### **Sumber Lain:**

Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.